



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.19612>
Volume 8, No. 3, 2023 (227-245)

PELAKSANAAN *ACCOUNTING* KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN (STUDI KASUS DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO)

Syamsul Arifin

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Syamsularifin8890@gmail.com

Adib Khusnul Rois

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

adibkhusnulrois@gmail.com

Khoirul Arifah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

arifahkhoirul2@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Accounting Keuangan Melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai salah satu perguruan tinggi swasta Unggulan di Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaganya, baik dari segi mutu akademik maupun non akademik. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pada aspek pengelolaan keuangan. Analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo berbasis sistem keuangan terpadu (SIMKEU). Untuk melihat keunggulan dari sistem akan diuraikan sebagai berikut: a) sistem ini meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaporan anggaran yang terjadi selama periode tertentu; b) membantu transparansi penggunaan dana dengan laporan bulanan yang tertata dengan rapi dan jelas; c) ketepatan sistem SIMKEU dalam pencatatan transaksi yang ada; 4) pencatatan sistem yang menghindarkan adanya dobel anggaran, pendanaan anggaran yang belum terprogram, serta penyalahgunaan dana yang ada; dan 4) kemudahan mahasiswa dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk mengetahui transaksi apa saja yang terjadi melaku Sistem Informasi Akademik.

Kata Kunci: Accounting, Keuangan, Manajemen

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Urgensi dari pendidikan bagi negara Indonesia sangat terasa ketika memasuki era globalisasi saat ini, dimana kualitas SDM negara sangat menentukan daya saing bangsa pada kancah persaingan global. Data dari *World Economic Forum (WEF)*, dalam *global competitiveness report* tahun 2015-2016 daya saing Indonesia menempati urutan ke-37 dari 140 negara. Pada tingkat ASEAN Indonesia masih dibawah Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 18, dan Thailand yang berada di peringkat 32.¹ Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa kondisi sumber daya manusia Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini mengindikasikan tuntutan Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pendidikan di Indonesia agar mampu berdaya saing dengan negara lain.

Permasalahan yang ada saat ini, menuntut lembaga pendidikan baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi untuk dapat memberikan mutu layanan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada peserta didiknya. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan atas yang nantinya melahirkan anak didik yang siap bersaing pada persaingan global diharapkan dapat menjadi *pionir* implementasi manajemen pendidikan sebagai usaha reformasi tata kelola pendidikan tersebut. Manajemen pendidikan itu sendiri meliputi manajemen pengajaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, sarana prasarana, manajemen humas, kesiswaan dan layanan khusus.²

Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu perguruan tinggi agar menjadi lembaga pendidikan yang dapat mencetak mahasiswa yang lebih baik adalah segi keuangan. Manajemen keuangan sangat penting hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan di lembaga. Sumber dana yang dimiliki oleh suatu perguruan tinggi, baik dari pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana

¹Indeks Daya Saing Global Indonesia Duduki Peringkat 37 dari 140 Negara, dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara>, diakses pada 11 Januari 2017.

²Aries Musnandar, *Dunia Industri dan Pendidikan* (Malang: UIN Maliki Malang, 2011), 1.

dari masyarakat atau pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus disiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan jujur.

Manajemen keuangan pendidikan tidak hanya membahas mengenai sumber dana yang diperoleh dan digunakan untuk mencari sumber-sumber pendanaan, tetapi untuk kelangsungan teknis. Petunjuk teknis tentang manajemen keuangan pendidikan, khususnya pelaporan keuangan belum di atur secara khusus. "Peran masyarakat dalam mendukung serta mengontrol manajemen keuangan pendidikan juga belum jelas".³

Masalah keuangan sangat erat hubungannya dengan pembiayaan. Itu sendiri merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kehidupan suatu organisasi. Dalam pengertian keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*).⁴

Ketiga bentuk pengelolaan keuangan tersebut akan sangat menentukan efektifitas penggunaan dana lembaga, efisiensi, dan transparansi anggaran. Permasalahan yang ada saat ini adalah banyak lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi yang belum memiliki standar yang jelas dalam tata kelola keuangan. Hal ini apabila tidak segera dirubah akan berdampak pada kualitas layanan dan kelangsungan perguruan tinggi tersebut di masa yang akan datang.

Melalui pengamatan yang peneliti lakukan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, ditemukan bahwa salah satu kampus swasta unggulan di Jawa timur bagian selatan ini telah melakukan manajemen keuangan dengan baik. Hal ini terlihat dari sistem tata kelola yang terintegrasi dalam satu pengelolaan, pembukuan (proses akuntansi) yang tertata rapi, serta adanya sistem manajemen keuangan berbasis teknologi.

Melihat sistem keuangan yang telah dilakukan Unmuh Ponorogo tersebut, tidak heran jika perkembangan Unmuh Ponorogo dalam berbagai bidang tumbuh dengan pesat. Mengacu pada keunggulan yang ditemukan oleh peneliti tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sistem manajemen keuangan Unmuh Ponorogo, yang akan peneliti fokuskan pada aspek pembukuan (*accounting*) keuangan. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat menemukan model sistem pembukuan keuangan lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan lembaga lain dalam tata kelola sistem keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan,

³Bastian Indra, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 1.

⁴Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 317.

perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.⁵ Dengan demikian, pengelolaan keuangan lembaga pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban keuangan.

Beberapa kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.⁶ Dalam pengelolaan keuangan, terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan program, perkiraan pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran.

Dari definisi diatas maka diambil pengertian bahwa pengelolaan keuangan adalah usaha atau kegiatan yang memproses keuangan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan adalah berfokus pada: 1) bagaimana memperoleh dana untuk pembiayaan lembaga; 2) bagaimana mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai; 3) bagaimana mengelola asset yang dimiliki secara efisien dan efektif.⁷

Konsep manajemen keuangan di lembaga pendidikan formal dapat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Budgeting atau penyusunan anggaran

Istilah anggaran sering kali dimaknai sebagai pengertian suatu rencana. Namun dalam bidang manajemen keuangan di lembaga pendidikan sering disebut dengan Rencana Anggaran Keuangan RAK atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB). Dalam istilah anggaran bukanlah suatu rencana. Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran” sebagai suatu rencana.

Lembaga Pendidikan diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB). Untuk itu lembaga pendidikan perlu mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, dana penunjang pendidikan (DPD), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.⁸

Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang diupayakan tidak terjadi anggaran

⁵Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan. *Manajemen Keuangan Sekolah*, 2007, 13.

⁶Lipham SM., *The Principleship: Concepts, Competencies and Cosos* (London: Longmart, 1985), 2.

⁷Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010), 6.

⁸Hadar Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi NonProfit Bidang Pemerintahan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 109.

pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut maka kehidupan lembaga pendidikan akan menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bagian keuangan tersendiri, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.

Anggaran (Budget) merupakan suatu instrumen yang dirancang untuk memfasilitasi perencanaan. Budget juga memberikan sebuah konteks proses perencanaan dalam pemilihan langkah-langkah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan penyusunan anggaran keuangan bertujuan untuk:

- a. Standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya.
- b. Mengetahui pelaksanaan serta selesainya suatu kegiatan.
- c. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
- d. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif.
- e. Menghemat biaya yang dikeluarkan sekolah.
- f. Memberikan gambaran anggaran menyeluruh mengenai kegiatan pendidikan.
- g. Mendeteksi hambatan kesulitan yang akan ditemui.
- h. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

2. Accounting atau pembukuan

Kegiatan kedua dari manajemen keuangan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Pengertian dari Accounting atau pembukuan adalah kegiatan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan di sekolah yang dilakukan oleh bendahara sekolah. Peran dan fungsi pembukuan dalam pendidikan adalah menyediakan informasi keuangan agar berguna dalam menentukan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh perguruan tinggi.⁹

Semua pengeluaran keuangan lembaga dari sumber manapun harus dipertanggung jawabkan dan dicatat oleh bendahara/akuntan universitas, hal tersebut merupakan bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:¹⁰

- a. Secara periodik, akuntan harus membuat laporan keuangan kepada untuk dicocokkan dengan RAPB.
- b. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti atau dokumen pengeluaran yang ada.
- c. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban keuangan.

⁹Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 53.

¹⁰Indra Bastian, 56.

3. Auditing atau pemeriksaan

Auditing adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan lembaga pendidikan untuk mengukur kinerja akuntan lembaga serta penggunaan anggaran selama satu periode tertentu. Untuk itu, auditing diartikan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat efektifitas kerja personil serta tingkat efisiensi penggunaan dana dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan lembaga pendidikan. Auditing bermanfaat pula untuk menemukan masalah-masalah keuangan sekolah serta hasil auditing dapat digunakan untuk meningkatkan perasaan bertanggung jawab bagi akuntan lembaga.¹¹

Pengertian auditing adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Auditing harus ditindak lanjuti agar tidak ada kekeliruan, kekurangan dan kelemahan dalam hal manajemen keuangan. Ditindak lanjuti berarti kesediaan para pihak pengelola keuangan untuk memperbaiki kinerjanya. Apabila terdapat kecurangan dalam hal penggunaan keuangan harus diberikan peringatan atau sanksi yang tegas agar merasa termotivasi dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. Tindak lanjut tidak hanya dalam hal negatif tetapi juga dalam hal positif, bagi pengelola keuangan yang melaksanakan kerjanya dengan konsistensi kejujuran serta tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan diberikan penghargaan.¹²

4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan lembaga perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu, prinsip keefektifan juga perlu mendapat penekanan. Dengan demikian, prinsip pengelolaan dana pendidikan meliputi transparansi, akuntabilitas, keefektifan, dan efisiensi. Adapun penjelasan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut:¹³

¹¹Abin Syamsudin Makmun, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Madrasah Dan Madrasah* (Bandung: Pustaka Educa, 2010), 169.

¹²Suharsini, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008), 317.

¹³Muslikhah Dwiheartanti, *Prinsip Pengelolaan Administrasi Keuangan* (disampaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Umbulsejahtera Umbulmartani Ngemplak Sleman), 2016. Dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/muslikhah-dwiheartanti-mpd/materi-prinsip-pengelolaan-administrasi-keuangan.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 10.00.

a. Transparansi

Transparan berarti ada keterbukaan. Transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya yang jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

c. Keefektifan

Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip keefektifan kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya:

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.

2) Dilihat dari segi hasil

Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya.¹⁴

5. Perkiraan/Account/Mata Anggaran

Transaksi yang terjadi di perguruan tinggi sangat banyak macamnya, agar pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan secara sistematis dan mudah dimengerti, setiap transaksi keuangan yang sejenis atau dianggap sejenis digabungkan dalam satu kelompok yang disebut dengan Perkiraan dan *Account*.

Dengan adanya susunan yang sistematis dari transaksi keuangan, akan mempermudah pemahaman dalam membaca laporan keuangan, terutama bagi manajemen yang berkepentingan melakukan aktivitas pengendalian terhadap kegiatan operasi.

Selanjutnya untuk mempermudah pencatatan, setiap perkiraan/*account* diberi nomor kode. Pada beberapa perkiraan/*account* terdapat sub perkiraan yang menjelaskan rincian dari perkiraan induknya. Dengan demikian akan terdapat perkiraan induk dan sub perkiraan induk.

6. Penyelenggaraan Buku-Buku Pencatatan Transaksi

Buku-buku pencatatan transaksi yang dipergunakan dapat dibagi menjadi:¹⁵

a. Buku Harian/Jurnal

Buku harian/jurnal yang biasa juga disebut sebagai buku/media pencatatan transaksi pertama (*book of original entry*), dilakukan secara harian dan ditutup pada setiap akhir bulan. Pada garis besarnya ada 2 jenis buku harian/jurnal, yaitu buku harian/jurnal khusus dan buku harian/jurnal umum.

Dalam buku harian/jurnal khusus dicatat data transaksi keuangan yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, sedangkan buku harian/jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat dalam buku harian/jurnal khusus.

Buku harian /jurnal yang diperlukan antara lain:¹⁶

- 1) Buku harian kas, buku ini mencatat rincian seluruh transaksi keuangan harian yang melalui Kas dan ditutup pada akhir bulan.
- 2) Buku harian bank, buku ini mencatat rincian seluruh transaksi keuangan harian yang melalui Bank dan ditutup pada akhir bulan, serta dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran.
- 3) Buku jurnal umum, buku ini mencatat rincian seluruh transaksi keuangan yang telah dikelompokkan jenis perkiraannya.
- 4) Buku besar, transaksi yang telah dicatat di dalam buku-buku jurnal/harian pada tiap akhir bulan diposting (dibukukan berdasarkan perkiraannya masing-masing) ke dalam buku besar. Untuk transaksi yang dicatat kedalam buku jurnal umum, posting dapat dilakukan pada saat yang

¹⁵Transaksi dan Pengelolaan Keuangan Universitas Pasundan, dalam http://keuangan.unpas.ac.id/home/uploads/file/TRANSAKSI_DAN_PENGELOLAAN_KEUANGAN.pdf diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 10.00, 47.

¹⁶Ibid., 48.

bersamaan dengan pencatatan kedalam jurnal umum tersebut. Angka-angka saldo buku besar selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan neraca lajur.

a. Buku Pembantu

Buku ini harus dibuat sebagai rincian buku besar untuk perkiraan-perkiraan tertentu. dari buku pembantu yang ada dibuatkan daftar saldo pada setiap akhir bulan untuk dicocokkan dengan saldo perkiraan buku besar yang bersangkutan. Buku-buku pembantu yang terpenting antara lain:

- 1) Buku pembantu piutang, buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar piutang. Tiap Piutang sebaiknya dicatat dalam kartu BPP.
- 2) Buku pembantu utang, buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar utang. Setiap Kreditur sebaiknya dicatat dalam satu kartu BPU.
- 3) Buku pembantu aktiva tetap, buku ini merupakan rincian perkiraan buku besar aktiva. Setiap aktiva tetap sebaiknya dicatat dalam satu kartu BPAT.

b. Pembuatan Ikhtisar Laporan Keuangan

Pada setiap akhir bulan semua perkiraan yang ada dalam buku besar ditutup dan kemudian jumlah mutasinya (debet dan kredit) sampai dengan akhir bulan itu dipindahkan ke Ikhtisar Laporan Keuangan untuk dijadikan dasar pembuatan laporan keuangan.

c. Penyiapan Laporan Keuangan

Dari ikhtisar laporan keuangan yang ada kemudian disiapkan laporan keuangan bulanan berupa:

- 1) Laporan posisi keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan lembaga sampai dengan bulan yang bersangkutan kemudian dibandingkan dengan bulan sebelumnya dalam tahun berjalan.
- 2) Laporan aktivitas menggambarkan pendapatan dan biaya dalam laporan bulan ini dan kumulatif sampai dengan bulan ini dibandingkan dengan anggaran untuk periode yang sama.
- 3) Laporan arus kas dibuat berdasarkan laporan harian kas, laporan pengeluaran kas/bank, dan laporan penerimaan kas/bank. laporan ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam bulan ini dan kumulatif sampai dengan bulan ini dibandingkan dengan anggaran untuk periode yang sama.
- 4) Laporan keuangan tahunan (laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas) disusun dari laporan keuangan pada akhir tahun buku yang bersangkutan, hasil usaha dan kas pada periode tahun yang bersangkutan dan disajikan secara komparatif dengan realisasi tahun buku sebelumnya dan dengan anggarannya.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paparan Data Sistem Pengelolaan Keuangan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai salah satu perguruan tinggi swasta Unggulan di Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas lembaganya, baik dari segi mutu akademik maupun non akademik. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pada aspek pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek terpenting dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Hal ini terjadi karena segala aktifitas tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai. Melihat urgensi dari pengelolaan keuangan terhadap pengembangan kualitas institusi tersebut, Unmuh Ponorogo berusaha untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada saat ini.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana sistem pengelolaan keuangan di Unmuh Ponorogo peneliti melakukan wawancara dengan bapak Arif Hartono, S.E., M.SA selaku Kepala BAPK, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Unmuh Ponorogo menerapkan sistem administrasi keuangan secara periodik, yaitu setiap 1 tahun sekali yang dimulai sejak bulan September sampai dengan bulan Agustus.
2. Keseluruhan proses keuangan di Unmuh Ponorogo baik dari segi pendapatan, pengeluaran, dan transaksi lain dikelola melalui Sistem Prosedur Mutu Keuangan yang dijalankan secara *online* melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU).
3. Alur dari pengajuan program kerja dan anggaran pada sistem keuangan Unmuh Ponorogo dimulai dari a) pengajuan program beserta anggaran yang dilakukan oleh masing Satker di lingkup Unmuh Ponorogo. Pengajuan program kerja ini meliputi program-program rutin dan program pengembangan/strategis, dan diajukan dalam bentuk *hard copy* maupun dalam bentuk sistem *online*; b) tahap selanjutnya adalah program kerja yang telah diajukan masing-masing Satker tersebut akan diplenokan dalam rapat Badan Pelaksana Harian (BPH), dalam rapat ini nantinya akan terjadi nego *costing* anggaran dan program yang disetujui maupun yang ditunda untuk periode selanjutnya; c) setelah program kerja dan anggarannya sudah disetujui masing-masing pihak, maka tahap selanjutnya adalah pengiriman program kerja dan anggaran kepada Majelis Dikti Persyarikatan Muhammadiyah untuk dianalisa, dan kemudian dikembalikan ke Universitas untuk disahkan.
4. Prosedur pencairan anggaran yang telah diajukan untuk membiayai kegiatan rutin dan pengembangan masing-masing Satker dilakukan berbasis surat dan sistem *online*. Pengajuan program pengembangan/strategis dilakukan melalui tahap *approve* Ketua Satker, Wakil Rektor terkait, dan Rektor, sedangkan untuk program rutin dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut: a) *Login User*; b) *approval* melalui 4 tahapan (pengusul, WR terkait, BAPK, dan staf keuangan (rekap); dan c) pencairan.

5. Pelaporan keuangan dilakukan secara bulanan, semesteran, tahunan, dan setelah akhir jabatan rektor.
6. Audit pengelolaan keuangan dilakukan tiap akhir tahun anggaran, dan tiap empat tahun sekali pada akhir jabatan rektor. Audit tahunan dilakukan oleh rektorat, dan kemudian dilaporkan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH). Sedangkan audit empat tahunan dilakukan oleh Tim Audit Majelis Dikti Persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya hasil audit ini dijadikan bahan pengembangan program universitas dan pengembangan pengelolaan keuangan institusi.

A. Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Telah diungkap pada pembahasan di atas, pengelolaan keuangan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tersentralisasi menjadi satu sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU) yang pengelolaannya terpusat di Bagian Administrasi Pengelolaan Keuangan (BAPK). Dengan sentralisasi ini seluruh aktifitas pengelolaan lembaga yang meliputi perencanaan, pelaksanaan keuangan, pengawasan, evaluasi penggunaan anggaran, sampai audit dikendalikan sepenuhnya oleh BAPK selaku pengelola keuangan lembaga.

Pengelolaan keuangan berbasis sistem ini dirasa sangat membantu dalam efisiensi, efektifitas, dan transparansi anggaran yang ada. Salah satu hal yang dirasa sangat terbantu dengan adanya sistem ini adalah bagian pembukuan/*accounting* keuangan lembaga.

Sebelum adanya SIMKEU ini, proses pembukuan seluruh transaksi keuangan dilakukan secara manual melalui penulisan pembukuan pada buku keuangan serta melalui program Microsoft Excel. Proses penulisan secara manual ini dirasakan pengelola BAPK sangat menyulitkan dalam pencatatan seluruh aktifitas yang ada. Melihat transaksi keuangan yang meliputi pendapatan lembaga, pengeluaran, serta berbagai transaksi lainnya, bagian BAPK merasa beban pengelolaan yang dirasakan semakin berat, sehingga teretuslah sebuah kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan terpadu yang mampu mengatasi problem-problem yang ada tersebut.

Melalui berbagai studi banding yang dilakukan pada Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka dibuatlah sistem keuangan terpadu (SIMKEU) ini. Dengan sistem SIMKEU ini, pembukuan keuangan dapat secara otomatis menjadi suatu sistem dengan sistem keuangan lainnya. Seluruh transaksi yang ada yang meliputi transaksi bank, pajak, pendapatan, pengeluaran, bantuan secara otomatis akan terdata

di sistem. Sistem inilah yang nantinya juga menjadi sistem kontrol validitas transaksi keuangan yang terjadi.

Secara ringkas alur sistem pembukuan di Unmuh Ponorogo berbasis SIMKEU adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Program kerja dan anggaran yang telah diajukan oleh masing-masing Satker dan yang telah disahkan akan diinput dalam SIMKEU dan dikelompokkan sesuai dengan pedoman pengkodean mata anggaran untuk mempermudah identifikasi dan perkiraan anggaran.
2. Seluruh transaksi yang masuk akan dikelompokkan dalam sistem pembukuan tersendiri, misalnya sistem transaksi keuangan dengan bank, sistem transaksi pajak, sistem rekapitulasi pendapatan, sistem rekapitulasi pengeluaran, dan lain sebagainya.
3. Seluruh transaksi yang terjadi secara otomatis akan menciptakan laporan harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan.
4. Seluruh transaksi ini akan direkap oleh beberapa akuntan yang memiliki tugas yang berbeda-beda.
5. Laporan pembukuan keuangan Universitas dilaporkan kepada masing-masing Satker setiap satu bulan sekali dalam bentuk print out berformat *Microsoft Excel* yang meliputi 1) Saldo awal di bank; 2) laporan pendapatan lembaga dari sumber pendapatan operasional, pendapatan mahasiswa, dan pendapatan bantuan/hibah; 3) belanja yang meliputi belanja operasional, belanja mahasiswa, dan belanja bantuan/hibah; dan 4) saldo akhir.

B. Analisis Data

Pembukuan/pencatatan setiap transaksi dalam lembaga pendidikan merupakan aspek penting dalam usaha lembaga menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Kesalahan sedikit saja dalam pembukuan ini akan mengakibatkan rusaknya sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Salah satu contoh dari hal ini adalah kesalahan dalam pencatatan transaksi masuk akan berakibat pada kesalahan penghitungan estimasi penyusunan pendanaan program kerja secara menyeluruh, begitu juga dengan kesalahan pada pembukuan transaksi keluar (belanja) akan berakibat pada ketidaksesuaian penggunaan anggaran dengan rencana program kerja dan anggaran yang telah disusun pada awal periode tahun akademik.

Kemampuan akuntan dalam melakukan pembukuan akan menentukan efisiensi dan efektifitas dalam bekerja. Efisiensi ini nantinya akan berdampak pada waktu yang dikeluarkan akuntan untuk menyelesaikan pembukuannya dan pendanaan kegiatan pembukuan. Melihat pentingnya efisiensi dan efektifitas pembukuan terhadap efektifitas program institusi secara keseluruhan Unmuh Ponorogo mengaplikasikan pembukuan berbasis sistem (SIMKEU).

BAPK selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan merasakan bahwa penggunaan sistem pembukuan manual sudah tidak relevan lagi digunakan seiring dengan banyaknya transaksi yang ada, baik transaksi masuk maupun keluar. Sehingga SIMKEU dirasakan sebagai solusi nyata dari permasalahan ini.

Seperti yang telah dibahas pada pembahasan di atas, SIMKEU menjadi sentral sistem keuangan lembaga. Proses pembukuan yang terjadi dalam sistem ini terjadi secara otomatis berdasarkan transaksi yang terjadi. Secara otomatis transaksi yang ada akan dikelompokkan berdasarkan kategorisasi kas lembaga di bank, pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir. Tiap-tiap transaksi yang ada juga akan dipisah-pisah lagi dengan adanya mata anggaran yang telah disusun berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) yang telah diusulkan masing-masing satker dan disahkan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH).

Dalam pembukuan keuangan lembaga, ada berbagai buku yang saling terkait untuk menjalankan fungsi akuntabilitas keuangan. Diantara pembukuan yang harus dilakukan adalah dengan merangkum keseluruhan transaksi pada buku jurnal, buku kas, buku bank, buku pajak, buku pembantu, dan lain sebagainya. Keseluruhan buku ini mempunyai fungsi masing-masing yang tidak bisa dihilangkan salah satunya. Dalam hal ini Unmuh Ponorogo tidak melakukan pembukuan secara manual, tetapi sudah memakai SIMKEU dan pengaplikasian program komputer (Microsoft Excel). Hal ini dilakukan karena pembukuan secara manual sudah tidak layak lagi untuk dilakukan dan dirasakan sangat mengganggu proses pembukuan yang terjadi. Sistem dan program yang ada saat ini berhasil meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pembukuan BAPK.

Dalam observasi yang peneliti lakukan, terdapat berbagai keunggulan dari sistem pengelolaan keuangan khususnya pembukuan. Tetapi juga tidak luput dari adanya kekurangan yang masih terjadi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan *accounting* keuangan lembaga ini menjadi bahan pengembangan pembukuan keuangan Unmuh Ponorogo di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada uraian di bawah ini:

1. Kelebihan

Apabila melihat dari perubahan model pengelolaan keuangan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari model manual menjadi satu kesatuan sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU), peneliti dapat menyimpulkan terdapat berbagai manfaat dan kelebihan dari pengelolaan keuangan dengan sistem ini, secara umum kelebihan dari sistem tersebut adalah:

- a. Sistem ini meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktifitas keseluruhan program, baik program Satker, program universitas, maupun program keuangan itu sendiri.

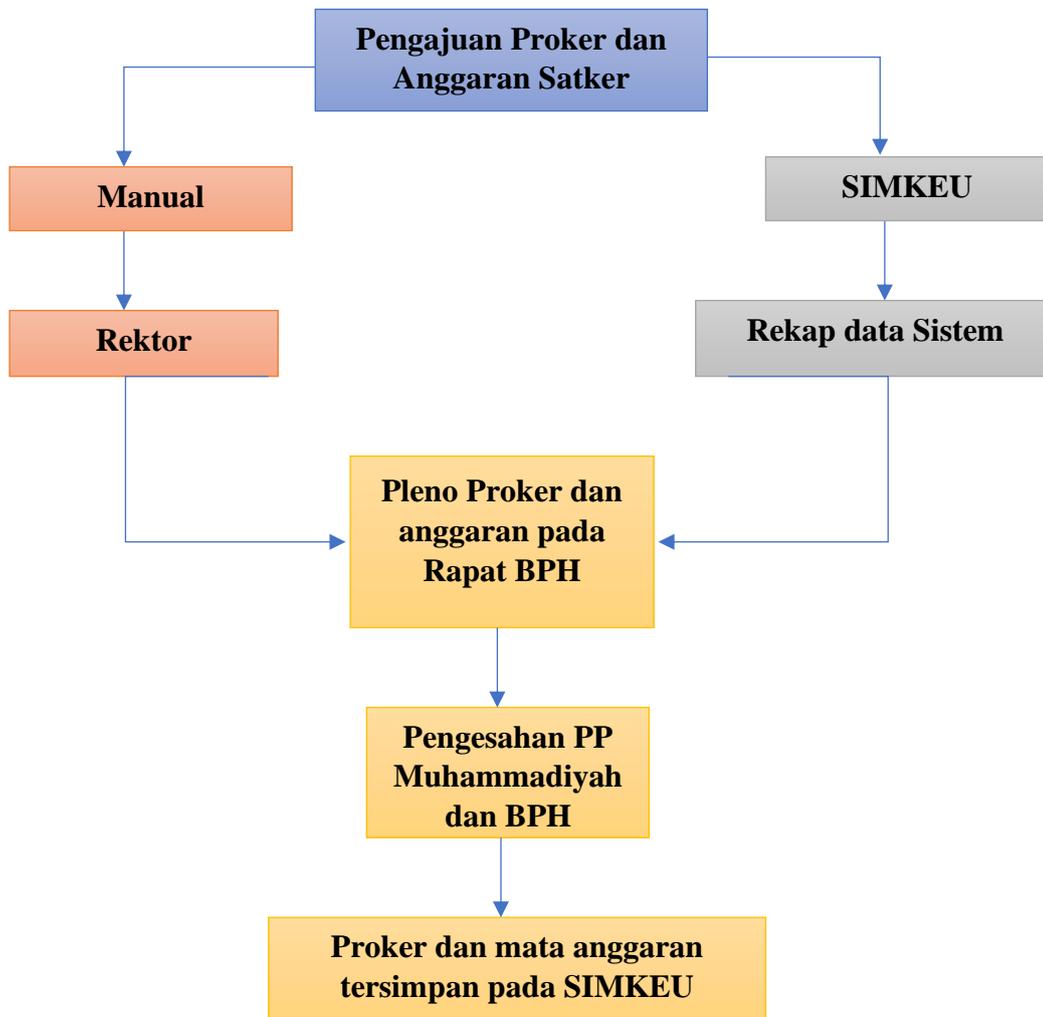
- b. Adanya sistem penjaminan mutu yang jelas dan menjadi rujukan bagi pengelolaan keuangan Universitas.
- c. Adanya alur pengelolaan keuangan lembaga yang tersistem mulai dari perencanaan (RAPB) sampai pada tahap audit keuangan.
- d. Adanya sistem pengawasan penggunaan anggaran berbasis sistem (*approval*) melalui beberapa tahapan yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas. Sistem ini secara otomatis akan menghindarkan adanya dobel anggaran, pendanaan anggaran yang belum terprogram, serta penyalahgunaan dana yang ada.
- e. Memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi keuangan melalui kerja sama dengan beberapa bank dan adanya sistem informasi akademik yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui seluruh kegiatan akademik, transaksi keuangan yang telah dilakukan, serta tagihan pembayaran.

Sementara itu secara khusus, manfaat dan kelebihan sistem ini bagi pembukuan keuangan Universitas adalah sebagai berikut:

- a. Sistem ini meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaporan anggaran yang terjadi selama periode tertentu.
- b. Membantu transparansi penggunaan dana dengan laporan bulanan yang tertata dengan rapi dan jelas.
- c. Ketepatan sistem SIMKEU dalam pencatatan transaksi yang ada.
- f. Pencatatan sistem yang menghindarkan adanya dobel anggaran, pendanaan anggaran yang belum terprogram, serta penyalahgunaan dana yang ada.
- d. Kemudahan mahasiswa dalam melakukan transaksi keuangan dan mengetahui transaksi apa saja yang terjadi dengan adanya integrasi sistem keuangan dengan Sistem Informasi Akademik.

2. Alur Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU)

Gambar 1
Bagan Alur Sistem Pengajuan Program Kerja dan Anggaran
Manual dan pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU)



PENUTUP

1. Kesimpulan

Melalui analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses pembukuan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo berbasis sistem keuangan terpadu (SIMKEU). Untuk melihat keunggulan dari sistem akan diuraikan sebagai berikut: a) sistem ini meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaporan anggaran yang terjadi selama periode tertentu; b) membantu transparansi penggunaan dana dengan laporan bulanan yang tertata dengan rapi dan jelas; c) ketepatan sistem SIMKEU dalam pencatatan transaksi yang ada; 4) pencatatan sistem yang menghindarkan adanya double anggaran, pendanaan anggaran yang belum terprogram,

serta penyalahgunaan dana yang ada; dan 4) kemudahan mahasiswa dalam melakukan transaksi keuangan dan untuk mengetahui transaksi apa saja yang terjadi melalui Sistem Informasi Akademik.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2008).
- Bastian, Indra, *Akuntansi Pendidikan* Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Buku Pedoman Akademik 2016/2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Tenaga Kependidikan. *Manajemen Keuangan Sekolah*, 2007.
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- Makmun, Abin Syamsudin, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip Dan Aplikasi Dalam Mengelola Madrasah Dan Madrasah Bandung*: Pustaka Educa, 2010.
- Musnandar, Aries, *Dunia Industri dan Pendidikan* Malang: UIN Maliki Malang, 2011.
- Nawawi, Hadar, *Manajemen Strategik Organisasi NonProfit Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Profil Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2014).
- SM. Lipham*, *The Principleship: Concepts, Competencies and Cosos* London: Longmart, 1985.
- Suharsini, *Manajemen Pendidikan* Yogyakarta: Aditya Media, 2008.

Sumber Internet:

- Indeks Daya Saing Global Indonesia Duduki Peringkat 37 dari 140 Negara, dalam <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/indeks-daya-saing-global-indonesia-duduki-peringkat-37-dari-140-negara>, diakses pada 11 Januari 2017.

Muslikhah Dwihartanti, Prinsip Pengelolaan Administrasi Keuangan (disampaikan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Untuk Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Umbulsejahtera Umbulmartani Ngemplak Sleman), 2016. Dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/muslikhah-dwihartanti-mpd/materi-prinsip-pengelolaan-administrasi-keuangan.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 10.00.

Transaksi dan Pengelolaan Keuangan Universitas Pasundan, dalam http://keuangan.unpas.ac.id/home/uploads/file/TRANSAKSI_DAN_PENGELOLAAN_KEUANGAN.pdf diakses pada tanggal 13 Januari 2017 pukul 10.00.

Lampiran 2
Alur Pembukuan Sistem Informasi Manajemen Keuangan

